

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan pemanfaatan belanja daerah Kota Kupang tahun 2020 saat terjadi covid-19 sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.
2. Anggaran belanja daerah memiliki manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kota Kupang tahun 2020. Manfaat dari anggaran belanja daerah yaitu untuk menunjang pengeluaran akibat dampak covid-19, seperti sewa insentif nakes, membayar peti jenazah, membayar pengobatan. Pemerintah daerah kota Kupang melakukan Pemanfaatan anggaran belanja daerah cukup baik khususnya pada anggaran belanja tak terduga dan pemanfaatan ini berguna untuk menangani pengeluaran / belanja covid-19 seperti insentif nakes, pengobatan, fasilitas, peti jenazah, biaya pemakaman, biaya satgas covid dan biaya lainnya yang berkaitan dengan covid-19.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan data penelitian dan data hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah, disaat terjadinya musibah virus covid-19 ini diharapkan agar bisa mengelola keuangan

dengan sebaik mungkin khususnya anggaran belanja agar berguna dan mampu meminimalisir biaya penanganan covid-19.

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik memanfaatkan anggaran belanja khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang anggaran makan dan minum cukup besar dari anggaran yang lainnya dan diharapkan agar lebih teliti dalam merefocusing anggaran belanja demi merasionalisasi anggaran belanja daerah dan demi meningkatkan mutu dari pelayanan public.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam pemanfaatan anggaran belanja daerah saat covid-19 dan mengetahui lagi dampak covid 19 terhadap anggaran belanja daerah Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul 2002. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : UB Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyitno, Andik. 2020. *Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*.
- Rahayu, Ani.2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hemahahua, Hayati. 2014. *Analisis APBD Kota Surabaya*.
- Amin, Fadillah. 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang : Penerbit UB Press.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Edisi 1. Depok :Penerbit Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia (<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> \_Diakses pada bulan Mei 2021).
- Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
- Yoga dan Tama. 2019. “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*”.
- Suyitno, Andik. 2020. “*Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto*”.
- Glory dan Lilis. 2020. “*Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi COVID 19*”.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis *pelaksanaan* tatanan normal baru yang produktif dan aman corona virus disease 19 (Covid-19) di Wilayah Kota Kupang.